

**PENDEKATAN *SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT* DAN  
*SOCIO-POLITICAL INTERVENSI* UNTUK MENGATASI KONFLIK  
SOSIAL SEBAGAI UPAYA MEMANTAPKAN KETAHANAN WILAYAH  
DI SURAKARTA**

*Rusnaini*

Universitas Negeri Surakarta

Email: Jurnal\_tannas@ugm.ac.id

**ABSTRACT**

*This paper explained the social conflict in Surakarta which showed in Christians and Muslims group conflict, residents' conflict which brought into religious conflict, and often connected with security and order issues, and also the conflict of Javanese against Chinese and Arabic ethnic. The qualitative and quantitative data of this paper showed the conflict as covert social hatred which potentially developed into tense, and with the conflict trigger would create inter group violence. Therefore the socio-cultural development approach and socio-political intervention approach carried out by the Surakarta Local Government to built cross cutting affiliation and cross cutting loyalties among different identities had not yet maximum.*

**Keywords:** *Social Conflict, Socio-cultural Development, Socio-Political Intervention, and Regional Resilience*

**ABSTRAK**

Tulisan ini menjelaskan tentang konflik sosial di Surakarta yang berupa konflik antar kelompok warga penganut agama Islam dan Kristen, konflik antar kelompok masyarakat yang dibawa ke ranah agama, di mana konflik jenis ini juga sering dikaitkan dengan isu keamanan dan ketertiban, serta konflik antar etnis Jawa terhadap etnis Cina dan Arab. Dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, tulisan ini menunjukkan bahwa konflik ini merupakan semacam kebencian sosial terselubung yang berpotensi berkembang menjadi ketegangan, dan apabila ada pemicu konflik maka akan terjadi kekerasan antar kelompok. Selain itu, ditemukan bahwa pendekatan socio-cultural development dan pendekatan socio-political intervention yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta belum maksimal dalam membangun cross cutting affiliation dan cross cutting loyalties antara kelompok-kelompok yang berbeda identitasnya.

**Kata Kunci:** *Konflik Sosial, Pembangunan Sosial budaya, Intervensi Sosial-Politis. Ketahanan Wilayah*

**PENGANTAR**

Sejauh ini ketahanan wilayah di berbagai daerah di Indonesia masih banyak mengalami ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang perlu dicari jalan keluarnya. Ketahanan wilayah Surakarta juga belum

menunjukkan kondisi yang baik. Salah satu masalah utama lemahnya ketahanan wilayah Surakarta adalah faktor konflik sosial. Masalah konflik sosial di Surakarta sudah banyak dibahas dan dibicarakan dalam berbagai tulisan atau karya ilmiah. Paling

banyak dibahas antara lain adalah masalah konflik antar etnis. terutama etnis Cina dan Jawa (Agus, 2010; Budiati, 2011). Dari berbagai buku dan hasil penelitian tentang konflik sosial di Surakarta. pada umumnya ditemukan penyebab konflik adalah nilai-nilai dan konflik budaya. Fenomena konflik sosial ini perlu disikapi agar tidak menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan melemahkan integrasi sosial. Kondisi ini berimplikasi pada ketahanan wilayah. Selanjutnya agar kondisi ketahanan wilayah mencapai tingkat yang cukup memuaskan. maka konflik sosial perlu diatasi dan diminimalisasi (Mustifa, 2005).

Hasil studi awal menunjukkan bahwa masalah konflik itu tidak sederhana karena setiap konflik dalam kehidupan sosial itu tidak selalu bentuk dan sifatnya sama (misal ada konflik individu atau kelompok. konflik terpendam atau terbuka dsb). Maftuh (2008:15) menguraikan empat tipe konflik mulai dari yang sederhana sampai yang bersifat kompleks.

*yaitu issues-specific conflict, relational conflict, structural-subsystem conflict dan structural system conflict. Issues-specific conflict*

adalah konflik tipe pertama yang paling sederhana yang sering terjadi antar individu atau kelompok. Sumber dari issues-specific conflict adalah satu atau lebih isu. misalnya perbedaan penafsiran terhadap informasi yang sama. ketidaksepahaman atas sesuatu. dan seterusnya. Dalam *relational conflict*. isu atau masalahnya sendiri kadang-kadang tidak merupakan sumber sebenarnya dari konflik. Konflik jenis ini sering terjadi karena stereotip ataupun prasangka. sehingga disebut *nonrealistic conflict*. Dalam *structural conflict*. sumber konflik terlembagakan di dalam sistem

sosial dan berada di luar hubungan pihak-pihak yang berkonflik. *Structural conflict* ini dapat dibagi ke dalam konflik dalam tingkat sub-sistem dan dalam tingkat sistem yang lebih luas. Konflik dalam tingkat subsistem maupun sistem sering mempengaruhi konflik antar individu dan antar kelompok yang merupakan anggota masyarakat tersebut. Konflik pada tingkat subsistem sering mencerminkan konflik pada tingkat sistem yang lebih luas. namun adakalanya konflik ini merupakan konflik yang berdiri sendiri.

## **PEMBAHASAN**

### **Tipologi Konflik Di Surakarta**

Penduduk Surakarta terdiri dari berbagai etnis. yang paling banyak dari segi jumlah berturut-turut adalah etnis Jawa. etnis Tionghoa dan etnis Arab pada umumnya menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Bahasa Jawa menjadi perekat kesatuan komunitas. Dengan beragamnya penduduk kota Surakarta. keberagaman lapisan sosial memiliki kecenderungan konflik budaya maupun konflik nilai-nilai. Hal ini disebabkan ketidaktoleranan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan penolakan terhadap tindakan-tindakan. pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan seseorang atau sekelompok orang yang lain.

Masalah konflik sosial di Surakarta memiliki sejarah yang panjang dan cukup lama. dan tidak jarang menimbulkan konflik komunal yang berulang-ulang. Namun. konflik sosial di Surakarta tidak selalu merupakan konflik yang manifest. dapat pula merupakan konflik laten yang ditentukan oleh kondisi dinamik masyarakat daerah Surakarta. Konflik terbesar dan memakan korban cukup banyak (baik harta maupun nyawa) terjadi pada

kerusuhan anti Tionghoa tahun 1966. kerusuhan anti Tionghoa tahun 1980 dan kerusuhan Mei 1998 (Kartono, 2004). Sampai saat ini, ada kecenderungan masalah agama dan etnisitas di Surakarta masih ada. Namun, konflik sosial yang paling sering terjadi adalah konflik antar pemeluk agama, khususnya menyangkut isu sensitif seperti pembangunan tempat ibadah. Berdasarkan hasil penelitian, tipologi konflik sosial di Surakarta dapat dipetakan sebagai berikut:

*Pertama*, konflik antar kelompok warga penganut agama Islam dan Kristen. Konflik jenis ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman bahwa dalam kehidupan komunitas-komunitas agama, setiap agama mempunyai hak penuh untuk berbeda dari agama lain. Perbedaan ini bukan saja diperbolehkan menurut hukum, melainkan juga harus dihormati. Konflik antar umat beragama ini sering terjadi karena stereotip ataupun prasangka, sehingga disebut *nonrealistic conflict*.

Kelompok Kristen beranggapan umat Islam tidak toleran, radikal dan sangat subjektif dalam keyakinan akan kebenaran agamanya, sedangkan kelompok Islam beranggapan umat Kristiani sebagai umat yang agresif dalam menyebarkan keyakinannya kepada umat lain (termasuk Islam) dan berambisi untuk menguasai segala aspek kehidupan. Umat Islam sering menganggap orang Kristen merasa diri mereka superior (*superior complex*) karena merasa agama mereka dianut oleh mayoritas orang di negara-negara barat. Dari konflik jenis ini, yang paling sensitif adalah masalah pendirian rumah ibadah. Pada bulan Desember 2010 pernah terjadi pembangunan gereja di pinggir kali di daerah Sangkrah diprotes dan didatangi kelompok laskar, Konflik terjadi karena

kelompok laskar memprotes dibangunnya gereja di dekat bantaran kali, padahal sejak ada musibah banjir, umat Kristen yang tinggal di bantaran kali tersebut sudah direlokasi di tempat lain. Konflik antar kelompok warga penganut agama Islam dan Kristen ini dapat dikategorikan sebagai *relational conflict*, isu atau masalahnya sendiri kadangkala tidak merupakan sumber sebenarnya dari konflik. Konflik jenis ini sering terjadi karena stereotip ataupun prasangka, sehingga disebut juga *nonrealistic conflict*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang paling sensitif adalah konflik yang disebabkan oleh pendirian rumah ibadah. Jadi konflik antar umat beragama masyarakat di Surakarta merupakan konflik nilai-nilai. Konflik jenis ini terjadi disebabkan kedua kelompok umat yang berbeda agama tersebut kurang memahami bahwa tidak mungkin melakukan negosiasi tentang nilai-nilai dan tingkah laku keagamaan dalam kelompok masing-masing.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Kleden (2008) yang mengatakan bahwa agama itu *unnegotiable*, dalam arti tidak mungkin orang Muslim dan Kristen bernegosiasi agar beberapa ritual dalam agama masing-masing dirubah agar tidak mengganggu yang lainnya. Jika ini dilakukan, akan menimbulkan konflik atau kekerasan. Untuk itu, seharusnya kita memperlakukan manusia secara setara dalam penghormatan di mana mereka serupa dengan kita, bukan dalam hal-hal dimana mereka berbeda dengan kita. Namun, Pemerintah Kota Surakarta sudah berupaya menyelesaikan masalah dalam urusan pendirian rumah ibadah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) Surakarta No. 6 Tahun 2011 tentang tata cara penerbitan ijin mendirikan bangunan rumah ibadah.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan terobosan yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Kleden (2008) bahwa negosiasi antara kepentingan atau keinginan yang kelompok yang satu dengan yang lain dalam pembangunan rumah ibadah bukan saja dimungkinkan, malahan diharuskan demi keharmonisan hidup bersama. Perwali no 6 thn 2011 mengatur kerukunan umat beragama dan tentang rumah ibadah. Perwali ini mengatur bahwa untuk pendirian rumah ibadah harus ada tanda tangan RT/RW. Di seluruh Indonesia, hanya Kota Surakarta yg punya Perwali seperti ini. Rumah ibadah yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sesudah bulan Maret tahun 2006 akan diputihkan. Perwali ini sudah melalui uji publik dengan mengundang pakar-pakar hukum dari UNS, UNISRI, UMS, termasuk elemen-elemen agama Islam, Kristen dan Katolik.

*Kedua*, konflik antar kelompok masyarakat yang dibawa keranah agama. Potensi konflik jenis ini adalah di daerah Semanggi, Joyosuran, Pasar Kliwon sampai Gandekan. Konflik ini disebabkan oleh faktor Politik, dan agama dijadikan alat legitimasi terhadap sikap-sikap agresif dan radikal mereka. Fenomena ini juga dapat dipahami sebagai keinginan suatu kelompok untuk menunjukkan eksistensi dan identitas yang terkait dengan permasalahan ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan dan terpaksa mereka terima. Sejalan dengan temuan ini, dapat dikatakan bahwa akar permasalahan konflik biasanya berhulu pada aspek yang berkaitan dengan ikatan primordial, serta berkaitan dengan aspek keruangan di mana para pelaku berada yang membutuhkan ruang gerak (space) untuk mewujudkan eksistensi dan identitasnya sesuai dengan keinginan

mereka. Konflik jenis biasanya terjadi antara berbagai kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) konflik kelompok miras dan elemen pergerakan Islam di Surakarta yang disebut LUIS (Lembaga Umat Islam Surakarta). Kehadiran kelompok laskar maupun kelompok miras dianggap oleh sebagian masyarakat Kota Surakarta sering meresahkan masyarakat umum. Kelompok laskar juga dianggap masyarakat sering melakukan tindakan main hakim sendiri, sedangkan kelompok laskar menganggap ada pembiaran dari aparat terhadap kelompok miras. Kedua kelompok seolah-olah hidup di zaman Agustinus (354-430) yang membedakan dua komunitas yang saling bertentangan, yaitu kelompok laskar sebagai komunitas Tuhan (*Civitas Dei*) dan kelompok miras sebagai kelompok dunia (*Civitas Terrena*), (Kalidjernih, 2007).

Subjektivitas telah menjadi alasan justifikasi dan legitimasi tindak kekerasan dalam konflik di antara kedua kelompok ini. Karena kerusuhan terjadi dalam bentuk gerakan massa, maka perilaku individu berubah menjadi perilaku kolektif yang emosional dan tidak rasional. Orang menjadi berani bertindak tanpa dipikir lebih dahulu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa solidaritas kelompok-kelompok yang terlibat di dalam konflik di Surakarta didasarkan pada kesadaran kolektif, yaitu suatu kesadaran bersama (*collective consciousness*), yang menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentiment-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Durkheim (Johnson, 1986) bahwa kesadaran kolektif ini membuat individualitas terus menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas (penyeragaman).

*Ketiga*, konflik antara etnis Jawa terhadap etnis Cina dan Arab. Konflik antara etnis Jawa dengan Cina, atau Jawa dengan Arab merupakan konflik budaya yang disebabkan antara lain oleh proses askripsi, yaitu gejala interaksi yang terjadi ketika orang dari aneka latar belakang bertemu satu sama lain di berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini seseorang itu tak diperlakukan sebagai pribadi yang mandiri, tetapi sebagai anggota suatu kelompok dengan askripsi tertentu.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Samovar, Porter dan Stefani (1998; 246) bahwa proses askripsi lamakelamaan berfungsi seolah-olah seperti deskripsi terhadap sekelompok orang, dan menimbulkan stereotip. Stereotip adalah suatu bentuk kompleks pengkategorian yang secara mental mengatur pengalaman-pengalaman kita dan membimbing tingkah laku kita terhadap kelompok tertentu, Stereotip biasanya berupa pandangan negatif terhadap suatu kelompok etnis tertentu. Stereotip selanjutnya diikuti dengan prasangka. Prasangka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hierarki sikap seseorang terhadap orang lain dan pada dasarnya merupakan reaksi emosional terhadap out-group yang dipicu oleh persepsi in-group. Prasangka juga merupakan sebuah sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut, sehingga individu-individu yang memiliki prasangka terhadap kelompokkelompok tertentu cenderung memproses informasi tentang kelompok ini secara berbeda dari cara mereka memproses informasi tentang kelompok lain. Hasil dari efek tersebut.

Prasangka menjadi sebuah lingkaran kognitif yang tertutup dan cenderung

bertambah kuat seiring dengan berjalannya waktu. Sebagai sebuah sikap, prasangka juga melibatkan perasaan negatif atau emosi pada orang yang dikenai prasangka ketika mereka hadir atau hanya dengan memikirkan anggota kelompok yang tidak mereka sukai. Oleh karena itu, dari generasi ke generasi, prasangka ini kemudian dapat menimbulkan kebencian sosial budaya terselubung (*socio-cultural animosity*) yaitu suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib di masa lalu (Budimansyah, 2009). Temuan ini dengan penelitian Kartono (2004) yang mengatakan bahwa konflik antara etnis Jawa dengan etnis Cina maupun Arab dapat dirunut pada sejarah persaingan bisnis batik di masa penjajahan dan sekitar masa pemberontakan PKI tahun 1965. Fungsi alokasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial waktu dulu tidak adil dalam pendistribusian sumberdaya. Jadi bahwa mengerasnya batas-batas kelompok (*group boundaries*) etnis ini sebagai akibat langsung dari kesalahan sejarah (Abdullah, 2006; 65-79). Berdasarkan wawancara dengan nara sumber, di masa kini, dalam pergaulan sehari-hari etnis Jawa (wong Jowo) di mata etnis Cina/ Tionghoa dianggap cuma cari sumbangan aja, sementara etnis Cina/Tionghoa di mata etnis Jawa dianggap eksklusif dan tidak mau bergaul, contohnya etnis Cina/ Tionghoa kalau ada kegiatan kerja bakti pasti hanya menyuruh atau diwakilkan oleh pembantunya yang etnis Jawa, atau hanya sekedar menyumbangkan makanan dan minuman saja. Akan tetapi, meskipun etnis Arab dan Cina ini jarang muncul atau terlibat dalam pergaulan di tingkat grass root, mereka sering muncul dalam pergaulan di tingkat elit yang banyak terpublikasi.

Dari penelitian juga ditemukan bahwa generasi muda dari kalangan etnis Cina/Tionghoa dan etnis Arab rendah partisipasinya dalam kegiatan sosial di wilayah kelurahannya. Berbeda dengan generasi muda dari etnis Jawa. Alasan dari kedua kelompok etnis ini adalah generasi muda sibuk dengan pekerjaannya. Etnis Jawa beranggapan bahwa kedua etnis ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan disebabkan jaringan etnis. Di mana terdapat interaksi yang teratur antara anggota-anggota etnis tersebut sehingga dengan jaringan ini terjadi distribusi sumber antara anggota-anggotanya (Tilaar, 2007; 5). Oleh karena itu status sosial ekonomi kedua etnis ini cukup tinggi karena tingkat pengangguran di kalangan kedua etnis ini diperkirakan sangat rendah atau mungkin nol.

Orang-orang muda dari etnis Cina dan Arab juga tidak tertarik untuk menjadi anggota ormas-ormas yang menjadi organisasi persatuan antar etnis. Misalnya forum persaudaraan bangsa Indonesia untuk kerukunan suku, etnis, dan budaya (FPBI) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no. 34 th 2006. Biasanya dari kedua etnis ini yang menjadi anggota atau pengurus hanya orang-orang tua, sehingga dikhawatirkan tidak ada regenerasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik antara etnis Jawa dengan etnis Cina ataupun etnis Arab disebabkan oleh latar belakang sosiokultural. Etnis Jawa menganggap warga keturunan atau etnis Arab dan Cina itu eksklusif. Warga keturunan Arab dan Tionghoa merupakan kelompok kultural yang menjalankan hidup secara berkelompok dan hanya terlibat dalam interaksi yang minimal dengan etnis Jawa. Padahal etnis Jawa sebagai kelompok mayoritas yang memiliki

kultur dominan sudah banyak membuat akomodasi-akomodasi bagi kedua kelompok etnis Cina dan Arab. Jadi, dalam tataran struktur, fenomena konflik sosial di Surakarta dapat dipahami sebagai hasil proses hubungan-hubungan sosial atau struktur di mana para pelaku berada yang dapat dipandang sebagai "imperatif struktural" yang terinternalisasi dalam diri individu-individu dalam suatu sistem sosial.

### ***Pendekatan Socio-Cultural Development***

Dalam upaya untuk menjembatani komunikasi kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan di Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta membentuk Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) dengan surat keputusan walikota dan Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta. FKUB dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Surakarta No 450/20/ 1/2007 agar tercipta kerukunan umat beragama di Surakarta. FKUB bertugas memberikan rekomendasi pendirian tempat beribadah dan memberikan solusi terkait konflik antar umat beragama, dan menjembatani komunikasi antar kelompok masyarakat dengan membuka forum-forum dialog untuk menampung aspirasi semua kelompok. Semua ini dilakukan FKUB untuk memberikan bahan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam pengambilan keputusan menyangkut permasalahan-permasalahan agama dan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa nampaknya peran FPBI dan FKUB mengalami beberapa kendala, antara lain sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan pengurus ataupun pembina menyangkut solusi permasalahan-permasalahan antar kelompok.

Selain membentuk FPBI dan FKUB. Pemerintah Kota Surakarta juga mengadakan kegiatan jambore kerukunan antar umat beragama Kota Surakarta tahun 2010. 2011 dan 2012 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta cq Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta bekerjasama dengan berbagai pihak. antara lain Korem Warastrama Surakarta. Kegiatan jambore diisi dengan ceramah dan berbagai aksi sosial. Sebagai contoh, jambore tahun 2012 diisi dengan ceramah tentang kebijakan pemerintah kota tentang kerukunan umat beragama. upaya menumbuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa dari perspektif kerukunan umat beragama.

Sosialisasi undang-undang penistaan agama dan kerukunan antar umat beragama. Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri dan kerukunan umat beragama berkaitan dengan pendirian tempat ibadah. dan bahaya HIV aids di kalangan remaja dan testimoni pengidap HIV aids. Selain itu. kegiatan jambore diisi juga dengan outdoor management games. olahraga. aksi sosial kebersihan dan penghijauan di halaman Pura Indraprasta Kelurahan Sondakan. Masjid Al Furqon di Kelurahan Pajang. dan Gereja GBIS Nafirision di Kelurahan Pajang. aksi pungut sampah sepanjang car free day, dan aksi donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Surakarta.

Berdasarkan wawancara dengan nara sumber dari Kesbangpol Kota Surakarta dapat disimpulkan bahwa kegiatan jambore mendidik warga masyarakat untuk mengedepankan dialog dan toleransi dalam segala permasalahan. Dalam hal ini peserta dididik agar memiliki sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis. Pendapat, sikap dan tindakan orang lain

yang berbeda dengan dirinya. Di samping itu, jambore juga menjadi penguatan secara menyeluruh dan terpadu tentang pemaknaan demokrasi dan faham kebangsaan dalam keragaman penduduk Kota Surakarta. Hal ini tentunya merupakan upaya yang baik dalam menumbuhkan perasaan bersatu bagi masyarakat Surakarta.

Selanjutnya pada tahun 2012 Pemerintah Kota Surakarta juga melakukan kegiatan gebyar seni persaudaraan budaya. Acara kegiatan gebyar seni persaudaraan budaya tersebut diisi dengan penampilan: (1) seni budaya (keroncong persaudaraan, reog generasi bangsa); (2) ceremonial (menyanyikan lagu Indonesia Raya, tari Retno Kusumo. sambutan-sambutan, tari Bugis Kembar, penyampaian materi kebangsaan); (3) pentas seni budaya (wayang orang dengan lakon Gatutkaca Krido dan karawitan). Gebyar seni yang dipentaskan merupakan ciri khas masyarakat Surakarta dilihat secara keseluruhan (holistik), yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasionalnya serta peranan yang dimainkannya dalam dunia lingkup nasional maupun internasional.

Berdasarkan wawancara dengan nara sumber, dapat disimpulkan bahwa acara gebyar seni budaya merupakan upaya menjaga keutuhan unit-unit budaya yang ada di Surakarta. Kegiatan ini dapat menjadi alat perekat antar anggota masyarakat. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta ini sangat penting mengingat melalui budaya atau sistem kebudayaan dikomunikasikan keteraturan sosial yang dapat direproduksi, dihayati dan dikembangkan oleh warga masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran akan identitas dan jati diri bangsa yang berada di tengah-tengah etnisitas dan

kosmopolitanisme (Raymond Williams dalam Tilaar, 2007). Jika etnisitas berkaitan dengan identitas budaya, maka kosmopolitanisme bertalian dengan proses-proses swatransformasi dimana bentuk-bentuk kultural tercipta dan ruang-ruang wacana baru terbuka terhadap suatu transformasi dunia sosial yang dialogis dan berkembang (Kalidjernih, 2009; 17).

### **Pendekatan Socio-Political Intervension**

Pada tahun 2012 Kantor Kesbangpol Kota Surakarta bekerjasama dengan Kodim 0735 dan Dinas Dispora Surakarta menyelenggarakan kegiatan TOT pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). Yang dimaksud dengan istilah pendidikan bela negara adalah pendidikan bagi warga negara agar memiliki sikap dan tindakan bela negara yang menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi TOT adalah bela negara, wawasan kebangsaan, kebijakan dinas dispora tentang pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, aplikasi bendera, lambang dan lagu kebangsaan, dan ESQ. Narasumber berasal dari beberapa kalangan, yaitu: Komandan Kodim 0735 Surakarta, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Surakarta, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa TOT pendidikan bela negara yang pernah diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Surakarta bekerjasama dengan Kodim 0735 Surakarta diberikan dalam rangka upaya mengatasi konflik sosial dan menanamkan pembinaan kebangsaan. Bagi bangsa Indonesia yang plural dan heterogen maka proses pembinaan kebangsaan lebih mengutamakan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, dan bagaimana suatu bangsa mengekspresikan dirinya di dalam lingkungan yang terus berubah.

### **Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan penanganan konflik sosial dengan kedua pendekatan sebagaimana diuraikan di atas membawa implikasi terhadap ketahanan wilayah Surakarta, ditandai dengan adanya dampak dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

*Pertama*, bidang ideologi, Forum-forum FPBI dan FKUB berpengaruh positif terhadap nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagaimana nilai-nilai ideologi Pancasila, Forum-forum ini juga menjadi wadah komunikasi agar konflik sosial tidak menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan melemahkan integrasi sosial. Secara tidak langsung FPBI dan FKUB sudah cukup baik dalam mengatasi ancaman dan gangguan di bidang ideologi, baik ancaman dan gangguan eksternal maupun internal. Ancaman dan gangguan eksternal adalah ancaman yang bersumber utama



pada faktor eksternal seperti masuknya ideologi luar seperti liberalisme, komunisme, fasisme dan lain-lain, sedangkan ancaman dan gangguan internal berupa chauvinisme, feodalisme, sukuisme, dan penetrasi budaya asing. Ancaman dan gangguan internal adalah kondisi masyarakat yang berlatar belakang masyarakat dengan sistem kerajaan tidak dapat dipungkiri meninggalkan sisa-sisa budaya feodalisme. Terbukti tidak ada kelompok yang bertahan dengan ideologi-ideologi baru yang dapat menggeser pemahaman dan pemaknaan terhadap ideologi Pancasila.

*Kedua*, bidang politik. Program-program yang dijalankan pemerintah kota tersebut di atas belum mampu mengatasi ancaman dan gangguan terhadap ketahanan politik di Surakarta, misalnya politik identitas yang menggunakan simbol-simbol identitas, seperti agama dan semacamnya sebagai alat propaganda untuk mendapatkan pengakuan masyarakat demi meraih kepentingan politik. Namun, program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan program lintas golongan yang memiliki titik pertemuan yang memungkinkan suatu komunikasi dan keterlibatan sosial secara langsung, sehingga proses komunikasi dan pertukaran berjalan seimbang. Hal ini kemudian dapat mengatasi definisi dan makna dari persamaan dan perbedaan antar kelompok. Pemerintah Kota Surakarta berinteraksi cukup baik dengan rakyatnya dengan melakukan berbagai kegiatan sebagaimana dipaparkan di atas. Dengan cara demikian, Kota Surakarta memiliki kestabilan politik.

*Ketiga*, bidang ekonomi, program-program yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta belum mampu mengatasi ancaman dan gangguan ketahanan ekonomi, seperti

ekonomi neoliberalisme, menguatnya budaya konsumerisme, dan era perdagangan bebas dimana barang-barang konsumsi seperti alat transportasi dan komunikasi, sandang pangan dan sebagainya masuk dari luar negeri tanpa terbelah sehingga mengalahkan barang-barang sejenis yang dapat diproduksi di dalam negeri. Namun demikian program-program tersebut menciptakan kerukunan, sehingga secara tidak langsung menyebabkan ketahanan ekonomi di Surakarta cukup baik. Kegiatan ekonomi rakyat yang bergerak di pasar tradisional maupun di pasar moderen berjalan dengan baik. Data BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa perdagangan dan industri, bisnis hotel dan pariwisata, keuangan dan perbankan di Kota Surakarta cukup bagus.

*Keempat*, bidang sosial budaya. Ancaman dan gangguan terhadap ketahanan sosial budaya di Surakarta adalah kapitalisasi budaya dimana terjadi pergeseran mendasar dari ruang budaya (*cultural sphere*) ke ruang komersial (*commercial sphere*), gaya hidup baru yang masuk lewat teknologi komunikasi dan transportasi. Meskipun program-program yang dijalankan mampu menjaga tradisi, budaya dan kerukunan masyarakat, namun secara umum belum mampu mengatasi ancaman dan gangguan ketahanan sosial budaya sebagaimana dikemukakan di atas.

*Kelima*, bidang pertahanan keamanan. Berdasar hasil penelitian ditemukan bahwa program-program pembinaan warga yang dilakukan pemerintah kota belum mampu mengatasi sepenuhnya ancaman dan gangguan bidang pertahanan keamanan, terutama dikaitkan dengan isu keamanan dan ketertiban. TOT belum mampu membina dan mengembangkan potensi masyarakat dalam cegah, tangkal, dan tanggulangni segala bentuk

gangguan keamanan umum yang meresahkan masyarakat. misalnya hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijakan pemerintah secara tidak konsepsional. seperti halnya jaringan terorisme ( Kapolda Jateng, 2012). Namun demikian, program TOT mampu menyatukan elit-elit lokal maupun masyarakat grass root agar bersatu padu menggunakan segala kemampuan dan kecakapan yang dimiliki agar tercipta keuletan dan ketangguhan mengatasi situasi yang mengancam eksistensi Surakarta. Misalnya, mengatasi ancaman yang merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan pemerintah pusat maupun pemerintah kota yang dilakukan secara konsepsional, kriminal serta politis. seperti halnya demonstrasi dan kerusuhan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas. dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kota Surakarta (Pemkot Surakarta) telah melakukan upaya-upaya pencegahan konflik dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola konflik dengan membentuk berbagai program yang bertujuan untuk menguatkan kembali lembaga dan mekanisme sosial yang mendukung terciptanya budaya damai dalam masyarakat.

Pendekatan *socio-cultural development* dan pendekatan *sociopolitical intervension* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dimulai dari kelompok elit di tingkat lokal. yang nantinya akan menular ke golongan akar rumput (*grass root*). Kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan ini meskipun sudah cukup baik. tapi belum maksimal dalam membangun cross cutting affiliation dan *cross cutting* loyalties antara kelompok-kelompok

yang berbeda identitasnya demi terjadinya integrasi sosial masyarakat Surakarta. Selain itu. FPBI dan FKUB Surakarta juga belum berperan dengan maksimal karena perbedaan pendapat di kalangan pengurus ataupun pembina menyangkut solusi permasalahan-permasalahan antar kelompok. Akibatnya. dalam beberapa hal seringkali forum FKUB dan FBI belum mampu menjembatani komunikasi antar kelompok dan tidak dapat menjadi semacam *safetyvalve* (katup penyelamat) yaitu salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial.

Namun demikian. temuan penelitian menunjukkan pendekatan *socio-cultural development* dan *socio-political inter-vension* yang dijalankan oleh para elit politik lokal di Surakarta untuk mengatasi masalah konflik sosial secara umum berimplikasi pada ketahanan wilayah Surakarta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, I. 2006. *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus, S. 2010. *Konflik Etnis Cina dan Jawa di Surakarta. Laporan Penelitian*. Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS.
- Budiati, AC. 2011. *Ketahanan Masyarakat Kota Surakarta (Model Pengelolaan Konflik Tionghoa-Jawa melalui Pendekatan Ketahanan Masyarakat. Tesis S2 Sosiologi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Budimansyah, D. 2009. *Membangun Karakter Bangsa Di Tengah Arus Globalisasi Dan Gerakan Demokrasi. Pidato Hamengku Buwono x. S. 2007. Merajut kembali keindonesiaan kita*. Jakarta: Gramedia

- Kartono, DT. 2004. *Pembentukan Sistem Ketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Surakarta: UNS Press
- Johnson, DP. 1986. *Teori Klasik dan Modern 2. Diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang*. Jakarta: PT Gramedia
- Kalidjernih, FK. 2007. *Cakrawala Baru Kewarganegaraan: Refleksi Sosiologi Indonesia*. Bogor: Regina
- Kleden, I. 2008. *Menulis politik: Indonesia sebagai utopia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Maftuh, B. 2008. *Pendidikan Resolusi Konflik*. Bandung: CV Yasindo Multi Aspek
- Mustifa, 2005. *Konflik dan Integrasi Sosial antara Etnik Ambon dan Etnik Muna Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Kasus di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Yogyakarta: Tesis. S2 Ketahanan Nasional (Magister Perdamaian dan Resolusi UGM)
- Samovar, LA, Porter, R.E & Stefani, LA. 1998. *Communication Between Cultures*. Belmont; Wardworth Publishing Company.
- Tilaar, HAR. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Tinjauan Dari Perspektif Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Makalah/Jurnal:**
- Kapolda Jateng. 2012. *Polcing dan kamtibmas dalam rangka pemeliharaan Kedamaian dan Pencegahan Konflik*. Paparan Kapolda Jateng pada Kegiatan FGD pengembangan Manajemen Konflik di Provinsi Jawa Tengah di Semarang. 29 Februari 2012.